

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskriminasi terhadap perempuan merupakan problem dehumanisasi dari praktik ketimpangan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindakan-tindakan diskriminasi terhadap perempuan menciptakan peluang penyimpangan terhadap citra diri seorang perempuan. Nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam diri seorang perempuan perlahan-lahan dieksploitasi oleh sesama dengan dalil dominasi status dan kelas tertentu. Diskriminasi terhadap perempuan sebagai suatu persoalan kemanusiaan menjadi bentuk bias gender yang aktual di lingkungan masyarakat. Persoalan gender yang terjadi mewarnai berbagai status serta peran sosial laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.¹ Konstruksi ketimpangan gender yang real dalam kehidupan masyarakat adalah gambaran superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Gambaran konstruksi ketimpangan gender semacam ini memproduksi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik penindasan, intimidasi, kekerasan, pembunuhan dan pelecehan seksual menjadi markah yang mereduksi martabat luhur seorang perempuan. Hal ini melegalkan adanya suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari seorang perempuan. Hak-hak kemanusiaan dalam diri seorang perempuan dilucuti secara tidak terhormat oleh kaum laki-laki, pribadi superior dengan kekuasaan yang mendominasi. Lebih jauh, gambaran ketimpangan gender yang dialami kaum perempuan menjustifikasi krisis moral sosial serta pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.

Tindakan diskriminasi terhadap perempuan terjadi dalam ranah privat, domestik dan publik. Berbagai kasus seperti pemerkosaan, pemukulan, penganiayaan, intimidasi, pelecehan seksual dan pembunuhan menjadi indikasi dari bentuk

¹ Willy Gaut, "Feminisasi Perdagangan Manusia", *Jurnal Ledalero*, 13:1 (Ledalero: Juni 2014), hlm. 68.

diskriminasi yang sering dialami perempuan, baik dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam lingkup kehidupan masyarakat secara luas. CATAHU (Catatan Tahunan Komnas Perempuan) memberi gambaran bahwa jenis diskriminasi seksual yang paling sering terjadi ialah hubungan personal dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual pada ranah publik.² Menurut data Komnas Perempuan sebanyak 79% kasus kekerasan terjadi pada ranah kehidupan personal dan keluarga. Jumlah ini meliputi kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran, kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar serta kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangga. Di samping itu, sebanyak 947 kasus diskriminasi seksual terjadi pada ruang publik hingga akhir tahun 2021. Kasus-kasus ini mencakupi kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.³ Problem-problem diskriminasi seksual terhadap perempuan secara eksplisit memberi gambaran bahwa wajah kehidupan perempuan sedang ditelanjangi, baik di ruang privat maupun di ruang publik. Di lain pihak, posisi kaum perempuan dilihat sebagai objek dari segala bentuk praktik ketimpangan dan ketidakadilan gender sehingga mampu mencederai martabat dirinya sebagai manusia.

Gambaran diskriminasi seksual sebagai bentuk fenomena sosial menjadi permasalahan yang kompleks. Berbagai permasalahan seputar diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi dalam tubuh kehidupan sosial memperlihatkan krisis nilai kemanusiaan dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Di sini, nampak jelas bahwa berbagai bentuk pelanggaran hak-hak perempuan bukan saja menjadi permasalahan kemanusiaan secara personal melainkan berbenturan secara langsung dengan berbagai masalah hukum, politik, budaya dan agama. Masalah kemanusiaan yang dialami kaum perempuan menjadi masalah yang berbenturan dengan segala tata nilai kehidupan manusia, secara khusus kehidupan kaum perempuan. Akan tetapi,

² Ely Dian Uswatina dkk., *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), hlm. 1.

³ *Ibid.*

perlu digarisbawahi bahwa pusat dari segala pelanggaran hak-hak perempuan bermuara pada harkat dan martabat dirinya sebagai manusia.

Landasan mendasar dari problem gender yang terjadi ialah setiap manusia memiliki nilai dan harga yang tidak bisa didasari oleh keinginan dan tuntutan orang lain. Nilai dari martabat diri manusia tidak dapat ditakar dengan kacamata kuantitatif yang dibentuk oleh manusia. Dengan demikian, diskriminasi yang menciptakan ruang pelanggaran terhadap harkat dan martabat kaum perempuan mendistorsi implementasi persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam kacamata feminis Jane Cary Peck, realitas gender dalam dunia kaum wanita sedang dilanda krisis kemanusiaan karena korban dominasi laki-laki. Kaum wanita terlalu gampang dimanipulasi dan diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.⁴ Wanita dieksploitasi menjadi korban kekuasaan laki-laki. Secara lugas pandangan-pandangan feminisme Jane ini menitikberatkan adanya bentuk tendensi kekuasaan kaum laki-laki dalam membangun otoritas yang absolut di tengah relasi dengan kaum perempuan.

Di lain pihak, Joan Wolski sebagaimana dikutip Willy Gaut dalam definisinya tentang feminisme menegaskan bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan berlangsung di dalam situasi dominasi budaya yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum laki-laki demi kepentingan kaum laki-laki itu sendiri.⁵ Gambaran subordinasi mulai dihidupi oleh kaum laki-laki sehingga dengan gamblangnya menempatkan perempuan sebagai kelompok kelas bawah yang selalu diobjekkan. Laki-laki dalam praksis ketimpangan gender menghidupi sebuah pola dominasi yang didasari pada dinamika berpikir oposisi biner. Pandangan ini membagi dunia dalam dua kategori antara yang lebih baik dan lebih buruk dari yang lain. Oposisi biner mereduksi keberadaan perempuan karena dalam aplikasinya struktur oposisi menghasilkan dampak kekuasaan yakni siapa yang berhak menindas siapa.⁶

⁴ Jane Cary Peck, *Wanita dan Keluarga: Kepenuhan Jati Diri dalam Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 62.

⁵ Willy Gaut, *op. cit.*, hlm. 69.

⁶ Purnama Andra, "Diskriminasi Simbolik kepada Perempuan", *Kompas*, 24 Desember 2021, hlm. 7.

Implikasi nyata dari pola oposisi biner melanggengkan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan sehingga melahirkan berbagai bentuk diskriminasi seksual.

Budaya dominasi kaum laki-laki yang mereduksi keberadaan kaum perempuan berakar pada stereotipe gender yang ditandai dengan pelabelan dan penandaan terhadap suatu kelompok menurut kategori gender.⁷ Di sini, posisi perempuan menjadi objek stereotip kaum laki-laki. Diskriminasi seksual mulai terbentuk dalam pola pikir kaum laki-laki yang haus dan nafsu akan posisi kekuasaannya. Gambaran dominasi gender memutlakkan pergeseran konsep dari perbedaan gender (*gender difference*) menuju ketimpangan dan ketidakadilan gender (*gender enequallity*). Pergeseran yang ada menempatkan pola pikir dengan gradasi nilai dimapankan karena ciri-ciri positif dijadikan monopoli oleh laki-laki dan ciri-ciri negatif dianggap sepenuhnya milik perempuan.⁸ Asosiasi ciri-ciri gender yang positif dengan laki-laki dan ciri-ciri negatif dengan perempuan menciptakan gambaran diri kaum laki-laki sebagai pribadi yang superior dan kaum perempuan sebagai pribadi yang inferior. Anggapan semacam ini melahirkan suatu situasi pembedaan, sebuah jurang ketimpangan gender terhadap kaum perempuan.⁹ Lebih jauh, dikotomi tingkatan gender yang dihidupi dalam struktur hidup masyarakat menciptakan berbagai peluang diskriminasi seksual terhadap kaum perempuan sebagai objek dari dominasi kaum laki-laki.

Secara aktual berkaitan dengan ketimpangan gender, kaum perempuan dalam keseharian hidupnya seringkali mengalami berbagai tindakan kekerasan (*violence*), intimidasi, penindasan, serta terpenjara dalam gengaman superioritas kaum laki-laki. Kaum perempuan terdepak dari kesetaraan gender. Kekuasaan dengan argumentasi kultur patriarkat semacam menjadi dalil justifikasi untuk menciptakan disparitas dalam relasi sosial antara perempuan dan laki-laki. Perempuan sendiri dipandang sebagai jenis kelamin kedua yang berbeda dengan kaum laki-laki, sehingga dalam

⁷ Saparina Sadli, *Berbeda tapi Setara* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 24.

⁸ A. Nunuk P. Murnianti, *Getar Gender; Buku Pertama* (Magelang: Indonesiatara, 2004), hlm. XIX-XX.

⁹ Willy Gaut, *op. cit.*, hlm. 70.

kehidupannya kaum perempuan dijadikan objek kekuasaan laki-laki. Gambaran seperti ini memperlihatkan adanya tendensi mengobjekkan perempuan sebagai pribadi yang lain.

Simone de Beauvoir dalam pandangan feminisme melihat adanya dominasi gender yang mereduksi eksistensi kaum perempuan. Baginya perempuan adalah sang *liyan* yang tidak hanya berbeda, tetapi juga sengaja dibedakan secara diskriminatif oleh laki-laki.¹⁰ Dalam pandangan Simone de Beauvoir, kecenderungan praktik ketimpangan sosial seringkali menempatkan posisi kaum perempuan sebagai pribadi yang tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, atas tubuh dan pikirannya sampai kesantunan pribadinya pun harus disesuaikan dengan keinginan lingkungan dan komunitas kaum dominasi. Otoritas kaum laki-laki menimbulkan pandangan yang merendahkan eksistensi perempuan. Secara radikal dapat dikatakan bahwa kaum perempuan dieksploitasi oleh kaum laki-laki dan dilihat sebagai jenis sex lain di luar diri mereka. Jenis sex lain (*second sex*) yang disandingkan pada diri kaum perempuan dalam pandangan kaum laki-laki seolah-olah tidak memiliki kehadiran, sebab yang memberi makna bagi mereka ialah kehidupan laki-laki.

Pandangan feminisme eksistensial Simone de Beauvoir menerangkan titik tolak ketimpangan gender bermuara pada dominasi kaum laki-laki. Dengan megadopsi aspek bahasa etis, ia mengemukakan bahwa laki-laki dinamai sang diri, sedangkan perempuan sang *liyan*.¹¹ Jika perempuan sebagai yang lain adalah ancaman bagi diri, maka perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Oleh sebab itu, jika laki-laki ingin hidup bebas maka dirinya harus mensubordinasi perempuan terhadap dirinya. Keberadaan laki-laki sebagai sang diri memberi semacam ancaman bagi kehidupan perempuan. Hal ini mengisyaratkan sebuah unsur penguasaan dalam diri laki-laki untuk sepenuhnya bertindak terhadap diri kaum perempuan.

¹⁰ Brenda Yanti dan Laksmi M. Prameswari, *Filsuf Wanita Pengguncang Abad ke-20* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 77.

¹¹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, penerj. Aquarini Priyatna Prabosmoro (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 262.

Simone de Beauvoir memberi gambaran tentang wanita dalam pandangannya tentang wanita mandiri (*independent women*) sebagai sosok pasif yang didesak oleh kaum pria kepadanya. Terlalu banyak wanita berpegang teguh pada hak istimewa kewanitaan, sementara terlalu banyak pria merasa nyaman dengan keterbatasan yang dikenakan pada wanita.¹² Titik tilik pemikiran Simone de Beauvoir ini bertolak pada realitas penyimpangan gender pada masanya. Kondisi perempuan sangat sulit untuk menentukan status dirinya sebagai pribadi yang merdeka. Letak keberadaan laki-laki pada masanya menampilkan kekuasaan yang mendominasi dalam memposisikan dirinya sebagai eksistensi pusat dunia. Laki-laki menempatkan dirinya sebagai subjek utama yang absolut sedangkan perempuan sebagai yang lain di luar dirinya.¹³ Pandangan ini kerap kali melahirkan konsep diskriminasi terhadap posisi sosial kaum perempuan. Diskriminasi seksual menjadi efek lanjut dari tendensi aktualisasi otoritas kaum laki-laki.

Diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan dalam realitas sosial memberi tanda akan adanya ketimpangan terhadap implementasi kesetaraan gender. Simone de Beauvoir lewat sudut pandang diskriminasi seksual terhadap perempuan melihat keberadaan perempuan selalu menjadi objek di dunia yang sifatnya sangat patriarkal. Baginya dunia perempuan kerap kali dimasukkan ke dalam dunia laki-laki sebagai bukti eksplisit dari suatu bentuk otoritas laki-laki untuk menguasai perempuan. Dalam *The Second Sex*¹⁴, secara masif ia mengeksplorasi situasi subordinat yang dialami perempuan dalam kehidupan masyarakat sebagai pemberi peluang munculnya diskriminasi gender; kekerasan seksual, penindasan, penganiayaan, pembunuhan dan pelecehan seksual. Bertolak dari situasi yang ada, ia sendiri menggagas perjuangan kemanusiaan dalam upaya membangun kesetaraan gender. Baginya tidak ada kelas sex kedua (*second sex*) sebab semua manusia baik

¹² Margaret Walters, *Feminisme: Sebuah Pengantar Singkat*, penerj. Devi Santi Ariani (Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD, 2021), hlm. 149.

¹³ Simone de Beauvoir, *The Second Sex*, penerj. H. M. Parshley (London: Jonathan Cape, 1966), p. 16.

¹⁴ Karya Simone de Beauvoir, *The Second Sex* yang diterbitkan pada tahun 1949 dalam salah satu sub bahasannya memberi penjelasan tentang pandangan Beauviour yang mengeksplorasi situasin sejarah kaum perempuan dan berkesimpulan bahwa mereka telah dicegah untuk mengambil kendali aktif atas kehidupan mereka sendiri. Bdk. Brenda Yanti dan Laksmi M. Prameswari, *op. cit.*, hlm. 93.

laki-laki maupun perempuan memiliki eksistensi yang sama sebagai manusia. Feminisme merupakan bentuk nyata yang ia hidupi untuk memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan kaum perempuan. Legitimasi terhadap kesetaraan dan kebebasan kaum perempuan menjadi amunisi bagi setiap perempuan untuk mununtaskan segala bentuk diskriminasi seksual.

Bertolak dari uraian di atas penulis hendak melihat bagaimana diskriminasi seksual terhadap perempuan menjadi fenomena sosial yang masih aktual hingga saat ini. Pandangan feminisme Simone de Beauvoir menjadi titik tolak bagi penulis untuk lebih dalam melihat sejauh mana gagasan feminisme menjawab problem diskriminasi seksual dalam tubuh kehidupan kaum perempuan. Feminisme Simone de Beauvoir menjadi landasan untuk menjawab problem dikriminasi seksual terhadap kaum perempuan dan menjadi jalan untuk merekonstruksi kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan perempuan. Uraian ini akan penulis paparkan dalam skripsi yang berjudul: **DISKRIMINASI SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF SIMONE DE BEAUVOIR.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas soal: bagaimana diskriminasi seksual terhadap perempuan dalam perspektif Simone de Beauvoir? Pertanyaan dasar ini penulis jabarkan dalam beberapa pokok persoalan sebagai berikut:

1. Apa hakikat diskriminasi seksual terhadap perempuan?
2. Bagaimana konsep feminisme Simone de Beauvoir?
3. Bagaimana perspektif feminisme Simone de Beauvoir menjawab problem diskriminasi seksual terhadap perempuan?

1.3 Tujuan Penulisan

Karya ilmiah ini dibuat dengan beberapa tujuan yakni: 1) Tujuan umum karya ilmiah ini berkaitan dengan usaha untuk menganalisis diskriminasi seksual terhadap

perempuan dalam perspektif Simone de Beauvoir. Adapun tujuan umum ini dijabarkan dalam tiga poin berikut: *Pertama*, memahami hakikat diskriminasi seksual terhadap perempuan. *Kedua*, memahami pandangan feminisme Simone de Beauvoir. *Ketiga*, membaca realitas problem diskriminasi seksual terhadap perempuan dalam perspektif Simone de Beauvoir. 2) Tujuan khusus karya ilmiah ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode kepustakaan untuk menggarap pokok-pokok bahasan yang hendak dikaji dalam skripsi. Berkaitan dengan metode pengumpulan data tulisan, penulis menggunakan buku-buku dan artikel-artikel sebagai sumber data rujukan dalam menulis. Buku-buku dan artikel-artikel, baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia menjadi basis acuan analisis deskriptif kualitatif yang dipakai oleh penulis untuk lebih jauh mendalami pokok bahasan yang hendak digarap dalam skripsi ini. Metode kepustakaan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam perspektif feminisme Simone de Beauvoir dalam menjawab realitas diskriminasi seksual yang dialami kaum perempuan. Oleh karena itu, gagasan feminisme Simone de Beauvoir dan gambaran diskriminasi terhadap perempuan menjadi landasan konseptual teoretis dari tulisan ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai upaya menjelaskan tema tulisan, penulis mengkonstruksi karya ilmiah ini berdasarkan sistematika berikut: Bab pendahuluan berisikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab kedua mengulas tentang hakikat diskriminasi gender, secara lebih khusus diskriminasi seksual yang dialami kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat. Bab ketiga, mengulas tentang konsep feminisme Simone de Beauvoir sebagai landasan untuk melihat realitas diskriminasi terhadap perempuan.

Bab keempat merupakan uraian inti yang membahas lebih dalam mengenai realitas diskriminasi seksual terhadap perempuan dalam pandangan Simone de Beauvoir. Bab kelima, berbicara tentang kesimpulan sebagai akhir dari rangkaian uraian analisis deskriptif karya ilmiah ini, melalui beberapa poin usul dan saran.